

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan untuk apotek dan calon apoteker yang akan menjalankan Praktek Kerja Profesi (PKP) Apoteker baik di Apotek Kimia Farma maupun di apotek lain yaitu :

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker yang akan menjalankan PKP Apoteker hendaknya mempersiapkan diri terkait dengan ilmu tentang obat-obatan, pekerjaan kefarmasian, peraturan perundang-undangan terkait, dan sistem manajemen di apotek melaksanakan PKP.
2. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya aktif dalam melaksanakan PKP Apoteker, karena sangat banyak pengetahuan dan keterampilan yang tidak diajarkan di perkuliahan namun bisa diperoleh pada saat melaksanakan PKP Apoteker.
3. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker diharapkan agar meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan pasien dalam melakukan KIE, sehingga informasi yang disampaikan dengan tepat dan baik.
4. Apotek Kimia Farma 166 sebaiknya dapat mencantumkan SOP setiap proses pelayanan di masing-masing area terkait sehingga dapat menjamin konsistensi mutu pelayanan yang diberikan.
5. Apotek Kimia Farma 166 sebaiknya menyediakan tempat khusus untuk penerimaan barang agar tidak mengganggu jalannya pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan di apotek.

**DAFTAR PUSTAKA**

- BNF, 2018. British National Formulary 76<sup>th</sup> Edition. BMJ Group, London.
- Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2007. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 1990. *Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/ MenKes/ SK/ VII/ 1990 tentang Obat Wajib Apotek*, Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- Lacy, C.F., Lora L.A., Morton P.G., Leonard L.L. 2013, Drug Information Handbook, Lexi-comp's Drug Refence Handbook, American Pharmacist Association.
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists Bethesda, Maryland.
- Medscape, 2019. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Maret 2019.
- MIMS, 2019. MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/Indonesia> [online]. Diakses pada Maret 2019.
- Motycka, C. 2015. 'Gastrointestinal and Antiemetics Drugs', in Whalen, K., Finkel, R. and Panavelil, T. A. (eds.), Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, 6<sup>th</sup>ed., Wolters Kluwer, Philadelphia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika*, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Seto, S., & Nita Y., 2015, Manajemen Farmasi tentang Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi. Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C., 2009, Martindale 36<sup>th</sup> edition, London, Chicago.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan.

Whalen, K., 2015, Drugs for Diabetes, in Whalen, K., Finkel, R., Panavelil., T. A., Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology 6<sup>th</sup> edition, Philadelphia,6:335-343.